

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara dalam proses pembangunan baik Pembangunan Ekonomi yang dilakukan dengan cara meningkatkan pendapatan perekonomian rakyat, pembangunan Sumber Daya Manusia yang dilakukan dengan pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar serta meningkatkan pengetahuan Sumber Daya Manusia dengan memberikan pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia. Pembangunan fasilitas umum untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat seperti jalan raya, jembatan, rel kereta api, dan sebagainya. Setiap pembangunan ini membutuhkan anggaran negara yang sangat besar dan cara agar Anggaran Negara ini dapat terisi adalah dengan melalui berbagai macam cara seperti pendapatan pajak, keuntungan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pengelolaan Sumber Daya Alam, pinjaman, sitaan terhadap sanksi pidana, percetakan uang atau sumbangan, dan sebagainya.

Dari berbagai macam cara untuk menghasilkan Anggaran Negara pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan pajak terdiri dari pajak kendaraan bermotor yang merupakan pajak yang diperoleh dari penguasaan atau kepemilikan kendaraan bermotor sedangkan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat yang menggunakan mesin berupa motor atau peralatan lain yang berfungsi

mengubah suatu sumber daya energy menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, Pajak Bumi dan Bangunan yang berasal dari bangunan dan tanah yang berada di daratan wilayah negara Indonesia seperti perumahan, kavling, gedung, mall, perhotelan, pantai, sawah dan sebagainya termasuk kedalam Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang –Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai dengan Undang-Undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya kewajiban tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berperan dan berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan dan pembangunan nasional.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling dominan,dan dalam menjalankan penyelenggaraan pembangunan suatu negara di butuhkan dana yang sangat besar. Dan pembangunan suatu negara baik dari segi utilitas air bersih, pembangunan sekolah, objek pariwisata, teknologi, dan lainnya adalah aspek terpenting guna memaksimalkan perekonoiam suatu negara. Pembangunan ekonomi ialah suatu proses yang mengakibatkan tingkatan pendapatan perkapita terus berlangsung dalam jangka panjang (Sukirno, 2010). Keuangan yang tidak sama terutama dengan Indonesia sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia, Pemerintah

tentunya akan mengalami permasalahan yang luar biasa dalam mencari solusi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pembangunan sebagai kewajiban pemerintah didanai dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memberikan penggambaran potensi daerah dalam memobilisasi potensi keuangannya, sehingga pemerintah daerah harus dapat mencari solusi untuk meningkatkan pendapatan daerahnya agar dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintahan pusat (Nazaria, 1997). Meskipun tiap daerah diberikan sumber pendapatan yang serupa, namun tidak mengartikan tiap daerah mempunyai jumlah pendapatan yang serupa dalam mendanai wewenangnya. Pendapatan daerah bergantung pada tiap keadaan yang dimiliki tiap daerah. Pemungutan pajak ialah alternatif paling potensial dalam memaksimalkan pendapatan negara. Hal ini disebabkan pajak mempunyai jumlah yang relative stabil. Di samping itu, pajak daerah ialah gambaran partisipasi aktif rakyat dalam mendanai penyelenggaraan pemerintah daerah (Suha Bahmid & Wahyudi, 2018). Dalam melaksanakan pembangunan yang bisa mengoptimalkan kualitas hidup masyarakat bukan hal yang mudah dilakukan, dikarenakan hampir di semua daerah didapati permasalahan keuangan (Mardiana, 2021).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting yang dinilai sebagai tingkat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan. Dan karena itu pemerintah daerah mencari jalan untuk mengembangkan potensi daerahnya masing-masing demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di daerahnya. Pajak hotel dan pajak pariwisata merupakan dua jenis pajak yang potensinya sangat besar dan dapat di kembangkan. Seiring berjalannya kemajuan jaman dimana kota-kota besar mulai

kehilangan destinasi wisatanya. Disinilah daerah-daerah kecil dapat mengembangkan potensi daerahnya untuk menarik wisatawan baik wisatawan asing maupun lokal yang membutuhkan hiburan dan destinasi wisata setelah kelelahan bekerja. Aspek ekonomi pariwisata berhubungan dengan kegiatan ekonomi yang langsung berkaitan dengan kegiatan pariwisata, seperti usaha perhotelan, usaha restoran dan rumah makan usaha hiburan transportasi, bisnis cedera mata dan lainnya (Mayasari & Raharjo, 2018). Pajak daerah ialah suatu sumber pendapatan daerah disamping Retribusi Daerah, dari perusahaan milik daerah serta hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya yang di pisahkan. Selain itu, pajak daerah ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan proses penyelenggaraannya dilaksanakan melalui Dinas Pendapatan Daerah.

Menurut (Pangerapan & , Herman Karamoy², 2018) Pajak Daerah adalah pajak yang berasal dari pungutan daerah berdasarkan peraturan daerah (perda) yang dipergunakan dalam mendanai urusan rumah tangga daerah selaku badan hukum publik oleh karena itu Negara dan pemerintah daerah berjuang untuk meningkatkan pendapatan daerah. Batam sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan negara Singapura dan Malaysia memiliki potensi yang sangat tinggi dalam menarik wisatawan asing. Dengan adanya kondisi seperti ini maka pemerintah Kota Batam sangat tertarik untuk mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber ekonomi bagi penduduk.

Hal ini dapat dilihat dari tingginya tingkat pembangunan di sektor pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batam. sebagai contoh adanya pembangunan masjid Agung Sultan Muhamad Riayat Syah yang menjadi masjid terbesar di

sumatera yang terletak di Kota Batam ini dibangun di atas lahan sebesar 5.1 hektar dan bangunan masjidnya sendiri seluas 4.1 hektar adapun masjid ini selain dibangun untuk tempat ibadah pemerintah Kota Batam juga mengharapkan masjid ini dapat menarik wisatawan asing maupun lokal sebagai tempat wisata religi demi meningkatkan Pendapatan Daerah. Kemudian pembangunan wisata pantai Glory Melur yang merupakan pantai bergaya resort yang baru di bangun dan terletak di jembatan lima barelang dan berada tepat di samping pantai melur yang lama merupakan salah satu tempat wisata baru, ada juga pembangunan Kepri Coral Resort yang terletak di pulau galang baru ini merupakan salah satu tempat wisata baru yang diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Daerah begitu pula dengan pembangunan wisata Pulau Putri yang terletak di Nongsa yang pada sedang dalam proses pembangunan hingga saat ini juga merupakan salah satu dari banyaknya destinasi wisata yang dibangun pemerintah, Kebun Raya Batam yang terletak di nongsa juga merupakan destinasi wisata yang baru dibangun pemerintah disini terdapat banyak wisata botani yang merupakan salah satu penarik wisatawan baik asing maupun lokal agar berwisata ke batam.

Selain destinasi wisata di atas masih banyak lagi destinasi wisata di Kota Batam yang terus di bangun pemerintah demi manaikan Kota Batam di mata wisatawan asing maupun lokal dan jalan-jalan di Kota Batam yang juga semakin di perindah begitu juga dengan tempat tinggal wisatawan yang pastinya harus dibangun untuk memfalisitasi wisatawan baik asing maupun lokal yang berupa hotel maupun Resort Seperti, Batam Marriot Hotel Harbourbay, Harris Resort Barelang, Montigo Resort, Nongsa Point Marina dan Resort, Aston Batam Hotel dan Residen dan sebagainya.

Hal-hal diatas membuktikan bahwasanya pemerintah daerah Kota Batam berjuang terus-menerus dalam mengembangkan pembangunan pariwisata demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam selain hotel dan dan pariwisata sekarang jalan-jalan di Kota Batam juga banyak yang mengalami perbaikan dan pelebaran. Serta lampu-lampu jalan dan taman – taman yang terlihat makin cantik dan menarik minat wisatawan.namun hasil realisasi yang diharapkan tidak selalu sama dengan yang ditargetkan oleh pemerintah.

Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan daerah diwujudkan guna mendorong pemerataan pembangunan demi mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki tiap daerah. Dalam menjalankan beragam aktivitas terkait penyelenggaraan pembangunan daerah tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Supaya pemerintah daerah bisa mengelola rumah tangganya dengan sebaik mungkin, maka dibutuhkan sumber pendanaan yang cukup. Namun dikarenakan tidak seluruh sumber pendanaan bisa diserahkan kepada daerah, maka pemerintah daerah diharuskan mengurus sendiri sumber keuangannya menurut aturan UU yang diberlakukan. Bagi penulis Realisasi dan Target Pajak Hotel beserta Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam :

Tabel 1. 1. Realisasi Pajak Hotel Kota Batam 2016-2020

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2016	88.302.500.000,00	86.315.275.232,05	97,75%
2	2017	96.350.000.000,00	89.124.163.872,37	92,50%
3	2018	107.147.368.332,60	108.854.974.662,00	101,59%
4	2019	132.509.347.069,00	123.261.476.601,30	93,02%
5	2020	65.041.777.000,00	44.398.892.403,41	68,26%

Sumber: Dinas Pendapatan Kota Batam 2016-2020

Tabel 1.1 menampilkan bahwasanya pada tahun 2016 target Pembayaran Pajak Hotel yang di perkirakan oleh pemerintah Kota Batam sebesar Rp.88.302.500.000,00 akan tetapi hasil yang terealisasi adalah Rp.86.315.275.232,05, sehingga masih kurang sebanyak Rp.1.987.224.767,90, jadi target yang diinginkan tidak tercapai di tahun 2016. Selanjutnya di tahun 2017 target yang di perkirakan pemerintah adalah sebesar Rp. 96.350.000.000,00 dan hasil yang terealisasi adalah Rp.89.124.163.872,37 sehingga masih kurang sebanyak Rp.7.225.836.127,60 jadi target yang di perkirakan tidak tercapai. Selanjutnya di tahun 2018 Pemerintah Kota Batam target yang di perkirakan adalah sebesar Rp.107.147.368.332,60 namun hasil yang terealisasi adalah Rp. 108.854.974.662,00 sehingga sudah mencapai target pemerintah Kota Batam. Kemudian di tahun 2019 berdasarkan data yang didapatkan dari perkiraan pemerintah pajak hotel yang ditargetkan sebesar Rp.132.509.347.069,00 yang terealisasi adalah Rp.123.261.476.601,30 jadi target yang di perkirakan tidak tercapai. Kemudian di tahun 2020 seperti yang tercantum pada table di atas pajak hotel yang di perkirakan sebesar Rp.65.041.777.000,00 dan yang terealisasi adalah sebesar Rp.44.398.892.403,41 target yang diinginkan tidak tercapai. Hal ini memberi indikasi, pajak hotel memiliki potensi sangat besar yang belum digali secara optimal pada proses penyelenggaraannya. Kenaikan pajak hotel

setiap tahunnya yang diperhitungkan dari realisasi jumlah penerimaan negara belum bisa menjadi ukuran keberhasilan pemungutan pajak yang sudah dilaksanakan Pemerintah Kota Batam.

Sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam dapat dilihat dari data berikut ini :

Tabel 1. 2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam 2016-2020

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	2016	909.266.681.460,69	881.268.969156,50	96,92%
2	2017	1.086.585.819.982,57	974.124.203.684,08	89,65%
3	2018	1.235.027.230.923,76	1.084.608.191.852,99	87,82%
4	2019	1.284.363.117.436,42	1.147.685.950.193,30	89,36%
5	2020	1.032.354.004.000,27	975.568.562.748,32	94,50%

Sumber: Dinas Pendapatan Kota Batam

Dari tabel 1.2 bisa di tarik kesimpulan PAD di Kota Batam berfluktuasi setiap tahunnya. PAD dari tahun 2016 hingga 2017 mengalami penurunan hingga 7,27% dengan capaian 89,65 %. Selanjutnya PAD tahun 2018 kembali mengalami penurunan hingga 1,83 % dengan capaian 87,82 %. Sedangkan PAD tahun 2019 mengalami sedikit kenaikan hingga 1,54 % dengan capaian 89,36 % dan PAD tahun 2020 kembali mengalami sedikit kenaikan hingga 5,14 % dengan capaian 94,50 %.

Ukuran keberhasilan pemungutan pajak hotel salah satunya yaitu dengan memperhitungkan efektifitas pemungutan Pajak Hotel. Dalam hal ini, efektifitas ialah kegagalan atau keberhasilan sebuah organisasi dalam memenuhi tujuan yang sudah ditetapkan. Konsep efektifitas jika dihubungkan dengan pemungutan pajak, dalam hal ini penerimaan pajak hotel, maka efektifitas yang dimaksud ialah berapa besarnya realiasi penerimaan pajak hotel mampu memenuhi potensi yang harusnya dipenuhi pada periode tertentu, dengan rumusan berikut (Halim, 2004) :

Salah satu ukuran keberhasilan pemungutan Pajak Hotel adalah dengan cara menghitung efektivitas pemungutan Pajak Hotel. Efektivitas adalah keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai tujuannya. Menurut Halim (2004) konsep efektivitas bila dikaitkan dengan pemungutan pajak, dalam hal ini penerimaan pajak hotel, maka efektivitas yang dimaksudkan adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak hotel berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu, dengan rumus sebagai berikut :

$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Potensi Pajak Hotel}} \times 100 \%$	<p>Rumus 1. 1. Efektivitas Pajak Hotel</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

Sedangkan untuk realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. berdasarkan data yang ada diketahui bahwasanya target yang ingin diraih pemerintah dari Penerimaan Pendapatan Asli Daerah telah tercapai dan melebihi perkiraan pemerintah. Pendapatan asli Daerah Kota Batam terus meningkat dari tahun- ketahun namun pada tahun 2020, Pendapatan Asli Daerah Kota batam Sempat mengalami penurunan namun tetap melebihi target yang di perkirakan Pemerintah. Melalui pemaparan tersebut, penulis memiliki ketertarikan guna mengambil judul **“Pengaruh Kontribusi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan tersebut, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi yaitu:

1. Pemerintah Kota Batam Masih kurang maksimal dalam mengembangkan dan mengontrol Pembayaran Pajak hotel.

2. Rendahnya Realisasi Pajak Hotel yang diterima oleh Kota Batam.
3. Permasalahan Efektivitas dalam penggunaan Pajak Hotel untuk Daerah

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi Masalah Penelitian diatas di karenakan keterbatasan waktu dan pengetahuan peneliti maka peneliti membuat batasan masalah seabgai berikut :

1. Dengan (Variable X1) kontribusi Pajak Hotel,(Variable X2)Efektifitas Pajak Hotel dan (Variable Y) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam
2. Data laporan Keuangan Pajak Hotel Dan Pendapatan Asli Daerah yang di pakai berdasarkan dari data laporan keuangan tahun 2016-2020

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari penelitian di atas maka rumusan masalah yang di dapatkan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah Kota Batam ditinjau dari efektivitas pajak Hotel periode tahun 2016-2020?
2. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah Kota Batam ditinjau dari Kontribusi periode tahun 2016-2020?
3. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah Kota Batam ditinjau dari efektivitas dan kontribusi Pajak Hotel periode tahun 2016-2020 ?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah dibuat diatas maka dapat di simpulkan tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Pendapatan Asli Daerah Kota Batam ditinjau dari efektivitas pajak Hotel periode tahun 2016-2020.
2. Untuk mengetahui bagaimana Pendapatan Asli Daerah Kota Batam ditinjau dari Kontribusi periode tahun 2016-2020.
3. Untuk mengetahui bagaimana Bagaimana Pendapatan Asli Daerah Kota Batam ditinjau dari efektivitas dan kontribusi Pajak Hotel periode tahun 2016-2020.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat di gunakan untuk menambah pengetahuan dan memperkuat hasil penelitian sebelumnya tentang Kontribusi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam, dan penelitian ini dapat di gunakan sebagai sumber referensi bagi penelitian selanjutnya. Penelitian ini berkaitan dengan Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam.

1.6.2. Manfaat Praktis

Berikutnya penelitian ini di harapkan bisa menghasilkan suatu hal yang berguna bagi peneliti sendiri, pihak terkait, ataupun masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti. Manfaat pada penelitian ini meliputi :

1. Bagi peneliti, diharapkan bisa memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang Pajak Hotel, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Hotel pada Pemerintah Kota Batam.
2. Bagi masyarakat, diharapkan bisa memberikan informasi terkait Pajak Hotel di Kota Batam.

3. Bagi pemerintah daerah (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), diharapkan bisa dijadikan acuan guna menyusun kebijakan dalam upaya pengoptimalan penerimaan PAD dan Pajak Daerah melalui Penerimaan Pajak Hotel.
4. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan bisa menjadi dasar acuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, secara khusus terkait perpajakan di masa mendatang.